PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas BerkatNya dan RahmatNya sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2024 masih tetap memuat Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Nunukan yakni Mewujudkan Tatanan Kehidupan Bermasyarakat Yang Aman, Tertib dan Tenteram.

Dengan demikian, dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 ini, akan dijadikan sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) bahan acuan pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2024 yang akan dilaksankan oleh masing-masing bidang/bagian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan. Selain itu, dokumen ini juga akan menjadi bahan acuan pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2024.

Nunukan, 29 Juli 2024
KEPALA SATUAN,

MESAK ADIANTO, S. Sos., M. Si
NIP. 19700810 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistimatika Penulisan 7

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 17

BAB IV
PENUTUP 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah didasari oleh amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara substansi pada Undang-undang tersebut mengamanatkan penyusunan perubahan Rencana Kerja sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaiman yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perubahan Rencana Kerja atau disebut Perubahan Renja merupakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasarkan pada pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Jadi alasan dasar Penyusunan perubahan renja berdasarkan peraturan tersebut di atas dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada Renja samapi dengan Triwulan II pada tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan dan situasi terhadap

perubahan arah kebijakan penganggaran pada pemerintah daerah pada umumnya dan khususnya pada SKPD.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2024, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodir kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat yang belum terfasilitasi dalam Renja murni Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024. Dokumen perubahan Renja ini, merupakan dokumen perubahan perencanaan Tahun 2024 yang disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakn program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 dengan menyesuaikan kondisi terkini dan untuk mengakomodir kebutuhan yang belum terselesaikan di tahun 2023, dan selanjutnya dokumen perubahan Renja ini akan menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2024 dalam rangka penyelesaian kinerja tahun berjalan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunuka tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Perturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Perturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
12. Permenpan dan RB. Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Repbublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026;
24. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 59 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan;
25. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 Nomor : 188.4/37/SATPOL.PP/XII/2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang kondisi yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dan menjabarkan perubahan perencanaan Tahun Anggaran 2024 sebagai panduan dalam menyusun dan merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dengan kondisi terkini dalam proses penyelesaian kegiatan;

2. Sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025;
3. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan potensi yang dimiliki;
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Berdasarkan Pasal 361 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah bahwa sistematika penyusunan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalh sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Terhadap Sasaran Indikator Kinerja

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja selain merupakan wujud pertanggungjawaban Satpol PP Kabupaten Nunukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Capaian target sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumusan Indikator	Target Kinerja 2024	Realisasi Kinerja 2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Minimnya pelanggaran K3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	Jumlah Pengaduan dan pelanggaran teridentifikasi yang diselesaikan / Jumlah pengaduan dan pelanggaran teridentifikasi yang masuk x 100 %	100%	48%
2.			Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada / Jumlah warga Negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum perda dan perkada x 100%	100%	-

Berdasarkan tabel di atas bahwa capaian indikator sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 belum mencapai 50%. Hal ini terjadi karena pada Triwulan I Tahun 2024, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Nunukan terfokus pada persiapan dan pelaksanaan pengamanan PILPRES dan PILEG, sehingga penanganan kasus yang ditarget 125 kasus hanya mampu ditangani sebanyak 69 kasus, namun pada Triwulan II penanganan kasus melebihi target yakni mencapai 137 kasus dari target 125 kasus. Dengan demikian capaian kinerja Persentase pelanggaran K3 yang tertangani sampai dengan Triwulan II sebesar 48% atau sebanyak 206 kasus dari target 250 kasus yang seharusnya sudah mencapai 50% sampai dengan Triwulan II. Hal ini terjadi karena :

1. Pada Triwulan I Tahun 2024 memprioritaskan pemenuhan kepentingan penyelenggaraan Pemilu, terkait penertiban Algaka (Alat Peraga Kampanye) dan penyiapan Pamsung TPS (Pengamanan Langsung Tempat Pemungutan Suara).
2. Banyaknya permintaan pendampingan dan Pengamanan pada event hari Ulang Tahun Kabupaten yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sehingga fokus pelaksanaan kegiatan diarahkan pada kegiatan tersebut.

Untuk lebih jelasnya evaluasi hasil pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat disajikan pada tabel berikut :

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024 (kumulatif Triwulan I dan Triwulan II)		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Catatan Penting
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*(10)= 8/6 *100*	*(11)= 9/7*100*	*12*
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**90.608.360.669,00**		**13.693.103.199,68**		**8.135.418.422,00**		**59,41**	
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**500 persen**	**71.240.778.789,00**	**100 Persen**	**11.685.938.205,88**	**48 Persen**	**7.280.565.667,00**	**48,00**	**62,30**	
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**50 Dokumen**	**276.089.492**	**10 Dokumen**	**78.074.364**	**6 Dokumen**	**58.838.225**	**60**	**75,36**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	61.537.439	1 Dokumen	10.574.364	1 Dokumen	3.730.760	100	35,28	

2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45 Dokumen	214.552.053	9 Dokumen	67.500.000	5 Dokumen	55.107.465	55,56	81,64	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**70 Bulan**	**49.189.319.578,00**	**14 Bulan**	**7.711.614.914,88**	**8 Bulan**	**5.048.384.628**	**57,14**	**65,46**	
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	49.070.630.043	79 Orang/Bulan	7.682.136.614,88	75 Orang/Bulan	4.997.920.078	94,94	65,06	
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	43.845.791	150 Dokumen	10.889.750	75 Dokumen	15.324.550	50	140,72	Realisasi anggaran sudah melebihi 100% karena Anggaran yang diperoleh tahun ini melebihi dari Pagu Renja
5.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28 Dokumen	44.253.658	7 Dokumen	10.991.050	4 Dokumen	25.720.000	57,14	234,01	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	30.590.086	3 Laporan	7.597.500	1 Laporan	9.420.000	33,33	123,99	
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian**	**25 Unit**	**782.299.926**	**5 Unit**	**260.283.462**	**5 Unit**	**488.760.000**	**100**	**187,78**	
7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	548.243.100	1 Paket	212.000.000	1 Paket	488.760.000	100	230,55	Realisasi anggaran sudah melebihi 100% karena Anggaran yang diperoleh tahun ini melebihi dari Pagu Renja untuk penambahan atribut sebagai pemenuhan sarana minimal (pendukung SPM)
8.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	169.358.721	2 Orang	35.325.000	0	-	0	-	

9.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	64.698.105	20 Orang	12.958.462	0	-	0	-	
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	**25 Unit**	**1.312.861.381**	**5 Unit**	**254.942.269**	**5 Unit**	**107.685.100**	**100**	**42,24**	
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	28.903.330	1 Paket	5.571.500	1 Paket	1.187.010	100	21,31	
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	177.805.140	4 Paket	49.255.440	2 Paket	29.200.000	50	59,28	
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	227.454.875	4 Paket	35.750.745	2 Paket	10.324.090	50	28,88	
13.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	90.352.751	3 Paket	17.094.932	0	-	0	-	
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137 Laporan	788.345.285	28 Laporan	147.269.652	10 Laporan	66.974.000	35,71	45,48	
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**6 Unit**	**234.000.000**	**1 Unit**	**39.000.000**	**0**	**-**	**0**	**-**	
15.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	234.000.000	1 Unit	39.000.000	0	-	0	-	
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60 Laporan**	**18.471.032.687**	**12 Laporan**	**3.142.736.296**	**6 Laporan**	**1.502.381.512**	**50**	**47,80**	
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	572.490.590	12 Laporan	93.324.000	6 Laporan	47.071.112	50	50,44	
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	17.898.542.097	12 Laporan	3.049.412.296	6 Laporan	1.455.310.400	50	47,72	
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan**	**78 Unit**	**975.175.725**	**16 Unit**	**199.286.900**	**10 Unit**	**74.516.202**	**62,5**	**37,39**	
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	732.873.603	9 Unit	177.996.900	9 Unit	72.524.202	100	40,74	
19.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	51.075.102	5 Unit	8.750.000	1 Unit	1.992.000	20	22,77	

20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	191.227.020	2 Unit	12.540.000	0	-	0	-	
II.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**500 Persen**	**19.367.581.880,00**	**100 Persen**	**2.007.164.993,80**	**41,20 Persen**	**854.852.755,00**	**41,20**	**42,59**	
8	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani**	**2500 Kasus**	**17.545.048.423,00**	**500 Kasus**	**1.630.445.733,80**	**206 Kasus**	**731.100.455,00**	**41,20**	**44,84**	
21.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 Dokumen	1.803.064.973	2 Dokumen	223.332.500	2 Dokumen	222.276.405	100	99,53	
22.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1200 Dokumen	796.958.776	240 Dokumen	150.560.000	0	-	0	-	
23.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5117 Orang	1.965.822.417	5012 Orang	86.465.440	0	21.460.000	0	24,82	
24.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	70 Dokumen	5.533.581.812	16 Dokumen	85.949.500	6 Dokumen	46.805.100	37,5	54,46	
25.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2500 Kasus	6.918.174.025	500 Laporan	991.631.290,80	206 Laporan	440.558.950,00	41,20	44,43	
26.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	15 Kasus	212.600.762	3 Lapo`	21.617.000	2 Laporan	-	66,67	-	

27.	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	20 Laproran	314.845.658	4 Laproran	70.890.003	0	-	0	-	
9.	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan**	**8 Perda/Perkada**	**1.331.164.193**	**8 Perda/Perkada**	**291.632.860**	**48 Perda/Perkada**	**112.592.300**	**50,00**	**38,61**	
28.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	19 Laporan	323.607.920	5 Laporan	64.792.000	3 Laporan	19.765.480	60,00	30,51	
29.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	250 Laporan	473.110.897	50 Laporan	110.094.880	8 Laporan	42.166.450	16,00	38,30	
30.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	240 Laporan	534.445.376	50 Laporan	116.745.980	12 Laporan	50.660.370	24,00	43,39	
10.	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	**10 Orang**	**491.369.264**	**2 Orang**	**85.086.400**	**0**	**11.160.000**	**0,00**	**13,12**	
31	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	10 Laporan	491.369.264	2 Laporan	85.086.400	0	11.160.000	0,00	13,12	
	Jumlah			**90.608.360.669,00**		**13.693.103.199,68**		**8.135.418.422,00**		**59,41**	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) menetapkan dua indikator. Adapun indikator tersebut dapat disajikan kedalam tabel seperti dibawah ini :

TABEL
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD Tahun					Proyeksi Tahun			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*13*	*14*
1	Persentase Penanganan pelanggaran Ketentraman dan ketertiban masyarakat		100	100	100	100	100	100	100	100	100	Relasiasi 2023 dan Proyeksi 2024 menggunakan persentase target realisasi program
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten.	100		100	100	100	100	100	100	100	100	Relasiasi 2023 dan Proyeksi 2024 menggunakan persentase target realisasi Kegiatan

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sedangkan Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja Negara sesuai dengan ketentuan berlaku.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2024 berisi program, kegiatan dan Sub Kegiatan baik untuk mencapai secara langsung sasaran untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2024 disajikan pada Tabel seperti dibawah ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA 2024			PAGU (Rp) TAHUN 2024			KETERANGAN
					Renja	DPA	Perubahan Renja	Renja	DPA	Perubahan Renja	
	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum		sesudah	sebelum		sesudah	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**13.660.833.867,88**	**15.636.562.628**	**16.949.093.374**	**1.312.530.746**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**11.653.668.874,08**	**13.303.906.383**	**14.175.167.129**	
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**78.074.364**	**141.712.735**	**141.712.735**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.574.364	10.727.295	10.727.295	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	67.500.000	130.985.440	130.985.440	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**14 Bulan**	**14 Bulan**	**14 Bulan**	**7.679.345.583,08**	**8.444.876.938**	**9.316.137.684**	
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	79 Orang/Bulan	79 Orang/Bulan	7.649.867.283,08	8.275.697.548	9.146.958.294	Penambahan kekurangan gaji dan TPP

4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	10.889.750	58.089.390	58.089.390	
5.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	10.991.050	55.772.000	55.772.000	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	7.597.500	55.318.000	55.318.000	
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian**	**5 Unit**	**5 Unit**	**5 Unit**	**260.283.462**	**590.880.600**	**590.880.600**	
7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	212.000.000	541.700.000	541.700.000	
8.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	35.325.000	31.257.600	31.257.600	
9.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	12.958.462	17.923.000	17.923.000	
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	**5 Unit**	**5 Unit**	**5 Unit**	**254.942.269**	**373.516.530**	**373.516.530**	
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.571.500	5.567.980	5.567.980	
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	49.255.440	167.944.000	167.944.000	
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7 Paket	35.750.745	52.842.950	52.842.950	ada Penambahan target, pengalihan dari belanja barang cetak dan penggandaan
13.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	17.094.932	-	-	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan digabung dengan Bahan Logistik Kantor

14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	147.269.652	147.161.600	147.161.600	
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**1 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**39.000.000**	**197.500.000**	**197.500.000**	
15.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.000.000	197.500.000	197.500.000	
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**3.142.736.296**	**3.152.324.320**	**3.152.324.320**	
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.324.000	102.986.000	102.986.000	
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.049.412.296	3.049.338.320	3.049.338.320	
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan**	**16 Unit**	**16 Unit**	**16 Unit**	**199.286.900**	**403.095.260**	**403.095.260**	
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	9 Unit	177.996.900	184.395.260	184.395.260	
19.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	8.750.000	8.700.000	8.700.000	
20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	12.540.000	210.000.000	210.000.000	
II.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	**100%**	**100%**	**100%**	**2.007.164.993,80**	**2.332.656.245**	**2.773.926.245**	
8	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani**	**Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani**	**500 Kasus**	**500 Kasus**	**500 Kasus**	**1.630.445.733,80**	**1.895.659.635**	**2.336.929.635**	
21.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	223.332.500	222.989.000	222.989.000	

22.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	240 Dokumen	240 Dokumen	240 Dokumen	150.560.000	150.559.630	150.559.630	
23.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5012 Orang	5012 Orang	5012 Orang	86.465.440	112.330.200	112.330.200	
24.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	85.949.500	175.725.670	616.995.670	Penambahan pembinaan Satlinmas di Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam rangka Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bidang Trantibum dan Kodim selaku pembina Satlinmas
25.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	500 Kasus	500 Kasus	500 Laporan	991.631.290,80	1.141.630.555,00	1.141.630.555,00	
26.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3 Kasus	3 Kasus	3 Laporan	21.617.000	21.535.500	21.535.500	
27.	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 Laproran	4 Laproran	4 Laproran	70.890.003	70.889.080	70.889.080	
9.	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan**	**Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan**	**8 Perda/Perkada**	**8 Perda/Perkada**	**8 Perda/Perkada**	**291.632.860**	**346.938.610**	**346.938.610**	
28.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	64.792.000	64.773.380	64.773.380	

29.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	110.094.880	138.654.840	138.654.840	
30.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	116.745.980	143.510.390	143.510.390	
10.	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	**Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	**2 Orang**	**2 Orang**	**2 Orang**	**85.086.400**	**90.058.000**	**90.058.000**	
31	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	85.086.400	90.058.000	90.058.000	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD yang berlandaskan pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah.

Perubahan Renja Satpol PP Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi yang disusun berdasarkan perubahan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dan hasil evaluasi pengendalian pelaksanaan Renja Satpol PP Kabupaten Nunukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada perubahan Renja ini masih sama dengan rencana kerja murni tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiata, 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, namun target indikator kinerja menyesuaikan dengan kondisi.

Dokumen perubahan Renja Satpol PP Tahun 2024 ini, akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2024. Dengan demikian semoga dokumen ini diharapkan dapat menjawab tantangan kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan dan dapat menjadi acuan dan pengarah dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini.

Nunukan, 29 Juli 2024
KEPALA SATUAN,

MESAK ADIANTO, S. Sos., M. Si
NIP. 19700810 199803 1 008